WALI KOTA PANGKAL PINANG

PENGUMUMAN

Nomor : 810/173/BKPSDMD/VIII/2024

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024

Dalam rangka mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 293 Tahun 2024 tanggal 02 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor : 188.45/ 168/BKPSDMD/VIII/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Pangkal Pinang membuka pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :

I. **JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN UNIT KERJA PENEMPATAN**

FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL :

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Alokasi Formasi		Unit Kerja Penempatan
			Khus us Disabi litas	Umu m	
1	2	3	5	6	7
1	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
2	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI BISNIS		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
3	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN

		ILMU KOMUNIKASI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 EKONOMI / S-1 PSIKOLOGI			PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN
4	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRIBISNIS / S-1 ILMU PANGAN / S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN / S-1 KEAMANAN PANGAN / S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN / S-1 TEKNIK PANGAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PANGAN DAN PERTANIAN | BIDANG KETAHANAN PANGAN
5	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 SISTEM INFORMASI / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN
6	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM / S-1 KEARSIPAN / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KEUANGAN DAERAH | SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN DAERAH | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KEUANGAN DAERAH
7	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN DIGITAL /		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT

		S-1 MANAJEMEN / S-1 PARIWISATA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KEARSIPAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 EKONOMI / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI			DAERAH | DINAS PARIWISATA | SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PARIWISATA
8	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV KEARSIPAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 KEARSIPAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI BISNIS		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
9	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG PENGELOLAAN ARSIP
10	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU III BIDANG PELAYANAN PUBLIK, SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
11	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

		AKUNTANSI BISNIS DIGITAL / D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV LAYANAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN			| SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | KECAMATAN GABEK | SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN GABEK
12	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL / D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | KECAMATAN RANGKUI | SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN RANGKUI
13	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL / D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV LAYANAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK /		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | KECAMATAN TAMAN SARI | SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM KECAMATAN TAMAN SARI

		S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN			
14	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL / D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV LAYANAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | KECAMATAN GIRIMAYA | SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM KECAMATAN GIRIMAYA
15	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL / D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV LAYANAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | KECAMATAN BUKIT INTAN | SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN BUKIT INTAN
16	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL / D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | KECAMATAN

		KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV LAYANAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN			PANGKALBALAM | SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM KECAMATAN PANGKALBALAM
17	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL / D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV LAYANAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | KECAMATAN GERUNGGANG | SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN GERUNGGANG
18	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS / S-1 DESAIN INTERIOR / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA | BIDANG KETENAGAKERJAAN
19	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS / D-III TEKNOLOGI INFORMASI		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

20	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS SOSIAL | BIDANG REHABILITASI SOSIAL
21	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV AKUAKULTUR / D-IV BUDIDAYA PERAIRAN / D-IV BUDIDAYA PERIKANAN / D-IV TEKNIK KELAUTAN / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 PERIKANAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN / S-1 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN / S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 TEKNIK KELAUTAN / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 PEMANFATAAN SUMBERDAYA PERAIRAN / S-1 AKUAKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
22	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

23	PENATA KEPROTOKOLAN	D-IV KOMUNIKASI MASSA / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SASTRA ARAB / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA		2	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL
24	PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERAMPIL	D-III ARSITEKTUR / D-III KONSTRUKSI GEDUNG / D-III KONSTRUKSI SIPIL / D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG / D-III TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG / D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PERUMAHAN
25	PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERAMPIL	D-III ARSITEKTUR / D-III KONSTRUKSI GEDUNG / D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNOLOGI SIPIL / D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG / D-III TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG / D-III TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PERMUKIMAN
26	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		2	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN
27	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA /		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN

		S-1 PLANOLOGI			UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG TATA RUANG
28	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 PSIKOLOGI / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIOLOGI		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA | BIDANG KETENAGAKERJAAN
29	PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL	D-III BUDIDAYA PETERNAKAN / D-III PRODUKSI TERNAK / D-III TEKNISI REPRODUKSI SATWA / D-III KESEHATAN HEWAN		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PANGAN DAN PERTANIAN | BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
30	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 GEOGRAFI / S-1 ILMU GEOGRAFI / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK PERMINYAKAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS
31	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK LOGISTIK		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN | BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
32	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV TRANSPORTASI DARAT		2	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

33	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III AGRIBISNIS PERIKANAN / D-III BUDIDAYA PERAIRAN / D-III BUDIDAYA PERIKANAN / D-III KELAUTAN / D-III PERIKANAN / D-III PERIKANAN TANGKAP / D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN / D-III TEKNOLOGI AKUAKULTUR / D-III TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA / D-III TEKNIK KELAUTAN / D-III PEMBENIHAN IKAN / D-III TEKNIK PENGOLAHAN PRODUK PERIKANAN		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN TANGKAP
34	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III BUDIDAYA PERIKANAN / D-III KELAUTAN / D-III AGRIBISNIS PERIKANAN / D-III BUDIDAYA PERAIRAN / D-III PERIKANAN / D-III PERIKANAN TANGKAP / D-III TEKNIK KELAUTAN / D-III TEKNOLOGI AKUAKULTUR / D-III TEKNIK PENGOLAHAN PRODUK PERIKANAN / D-III PEMBENIHAN IKAN		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
35	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN / D-III PEMBANGUNAN SOSIAL		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
36	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D-III PEMBANGUNAN SOSIAL / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III SOSIOLOGI PEDESAAN / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |

					BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
37	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN / D-III PENGELOLAAN LINGKUNGAN / D-III BIOLOGI / D-III KIMIA		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH
38	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
39	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIK		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
40	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KEUANGAN DAERAH | BIDANG ANGGARAN
41	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS / D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG KEWASPADAAN

					NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
42	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI		2	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | BIDANG PERENCANAAN, PENGADAAN, MUTASI DAN DATA
43	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS / D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI	1	1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
44	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS		1	PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | SEKRETARIAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Jumlah Keseluruhan Formasi		1	48	

II. KRITERIA PELAMAR

A. Formasi Khusus

1. Penyandang Disabilitas dengan ketentuan :
   (a) Calon Pelamar berasal dari penyandang Disabilitas Fisik tunadaksa, tunarungu dan tunawicara dengan derajat 1 atau 2;
   (b) Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
   (c) Peserta wajib hadir saat dipanggil oleh panitia sebelum pengumuman administrasi.
   (d) Pelamar penyandang disabilitas Sensorik Netra yang mendaftar pada formasi khusus Penyandang Disabilitas dan mengatur waktu pelaksanaan SKD dan SKB masing-masing selama 130 (seratus tiga puluh) menit berdasarkan diktum KELIMA Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 ;

B. Formasi Umum.

Pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana Pelamar Khusus pada huruf A di atas.

C. Formasi umum dan Khusus yang dapat diisi Oleh Penyandang Disabilitas :

(a) Formasi Umum dapat diisi oleh Penyandang Disabilitas;
(b) Calon Pelamar wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah dan diunggah pada SSCASN.
(c) Jika tidak diunggah dapat digugurkan status kelulusannya.
(d) Peserta wajib hadir saat dipanggil oleh panitia sebelum pengumuman administrasi.
(e) Bagi pelamar penyandang disabilitas Sensorik Netra yang mendaftar pada Formasi Umum atau formasi khusus lain, selain formasi khusus Penyandang Disabilitas, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan seleksi pendaftar pada Formasi Umum;
(f) nilai ambang batas/*passing grade* mengikuti nilai ambang batas/*passing grade* Formasi Umum;

III. PERSYARATAN PELAMARAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia paling rendah 18 Tahun dan paling tinggi 35 Tahun pertanggal pada saat pendaftaran
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Berkelakuan Baik yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepala Kepolisian Resor Setempat yang masih berlaku, dan wajib dilengkapi ***setelah*** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, dan wajib dilengkapi ***setelah*** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang sesuai unit kerja penempatan yang membutuhkan.
10. Bebas Narkoba yang dibuktikan oleh Surat Keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Setempat yang masih berlaku, dan wajib dilengkapi ***setelah*** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.
11. Bersedia mengabdi di Pemerintah Kota Pangkalpinang, dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) tahun sejak terhitung mulai tanggal PNS yang dilengkapi dengan surat pernyataan ***setelah*** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir .
12. Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Penjabat Walikota Pangkalpinang Tahun 2024.
13. Membuat Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai anak lampiran anak lampiran 3 Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018, dan wajib dilengkapi ***setelah*** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang Program Studinya terakreditasi pada pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; atau pangkalan data (database) badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
2. Memiliki Nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal 2,0 (dua koma nol).
3. Pada saat mendaftar, pelamar telah memiliki ijazah dan transkrip nilai dari Perguruan Tingginya (bukan berupa Surat Keterangan Kelulusan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan).
4. Khusus pelamar Disabilitas, Wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas. Setelah pendaftaran online pelamar disabilitas dimintakan hadir langsung menemui panitia di BKPSDMD Kota Pangkalpinang.
5. Pelamar yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa (seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil

IV. KETENTUAN PENDAFTARAN

A. Cara Pendaftaran dapat dilihat di https://sscasn.bkn.go.id bagi pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil serta dapat diunduh di Website https://bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id

1. Pengunggahan Dokumen :
   (a) Seluruh dokumen discan dalam format PDF dan dikirim oleh pelamar melalui unggahan secara online.
   (b) Seluruh dokumen yang discan dalam format PDF adalah dokumen asli, bukan dokumen hasil fotocopy yang discan. **Contoh : Ijazah, yang discan adalah ijazah asli, bukan ijazah fotocopy legalisir asli.**
   (c) Dokumen yang dikirim secara online adalah berupa
      (1) Surat Lamaran yang ditujukan kepada Penjabat Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 diketik menggunakan komputer dan ditempel e-materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani tinta hitam/biru;
      (2) Ijazah dan Transkrip Nilai Asli bukan dari hasil fotocopy yang dilegalisir;
      (3) Kartu Tanda penduduk Asli/Surat Keterangan sudah Merekam dari Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil bukan dari hasil fotocopy;
      (4) Surat Pernyataan yang diketik menggunakan komputer dan ditempel e materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani menggunakan tinta biru/hitam.;
      (5) Khusus pelamar Disabilitas, Wajib melampirkan Surat Keterangan dari Rumah sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas;
      (6) Pas Photo terbaru dengan kemeja putih, berlatar belakang merah dengan besar file 120 kb-200kb. Dengan format JPEG/JPG
      (7) Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah

2. Verifikasi Berkas.
   (a) Tim verifikator Instansi melakukan verifikasi berkas yang diunggah berdasarkan syarat pendaftaran.
   (b) Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, dapat mencetak Kartu Peserta.

B. Waktu Pendaftaran

Batas waktu pendaftaran secara online dimulai pada tanggal **20 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **06 September 2024**.

V. PELAKSANAAN SELEKSI

A. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi.
   Dalam seleksi ini, dilakukan sistem gugur dengan penilaiannya berupa kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT).
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

B. Tempat Seleksi

Kantor UPT Badan Kepegawaian Negara Pangkalpinang, Jalan Air Salemba, Kel. Air Salemba, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dan atau sesuai titik lokasi yang disediakan oleh Panitia Seleksi Nasional dan akan diinformasikan lebih lanjut.

C. Waktu Seleksi.

Diinformasikan lebih lanjut melalui website https://bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id dan papan pengumuman.

D. Ketentuan Waktu Seleksi/Ujian

1. Pada saat test SKD dan SKB, pelamar menggunakan pakaian kemeja berwarna putih (Lengan Panjang), celana berwarna gelap dan bersepatu.
2. Membawa KTP Asli bukan fotocopi
3. Membawa Kartu Peserta Ujian Asli bukan fotocopi

VI. SISTEM KELULUSAN

A. Kelulusan Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi ditentukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

B. Kelulusan Seleksi Kompetensi dan akhir

Kelulusannya didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negera;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 173 Tahun 2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN.

1. Informasi lain mengenai penerimaan CPNS Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dapat diakses melalui website resmi https ://bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id/website/
2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
3. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan keputusan rapat dan persetujuan dari instansi yang berwenang.
4. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan

penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

5. Bagi pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai CPNS, akan dikenakan sanksi pengguguran dan pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Seluruh pelamar CPNS tidak dipungut biaya (gratis).
7. Untuk lebih lanjut, mengenai waktu, tempat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penerimaan CPNS tahun 2024 dapat dilihat di website resmi https://bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id/website/
8. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dapat menghubungi helpdesk call Center **0822-8227-0787** pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.00 WIB s/d. 14.00 WIB dan sabtu Pukul 09.00 WIB s/d 12.00 WIB.
10. Pengaduan pelaksanaan test seleksi CPNS di Nomor HP. **0822-8227-0787** (hanya menerima WhatsApp dan SMS)

Pangkalpinang, 15 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG

WALI KOTA PANGKAL PINANG

BUDI UTAMA

LAMPIRAN I
PENGUMUMAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 810/ 173 /BKPSDMD/VIII/2024
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2024

CONTOH SURAT LAMARAN

LOKASI PESERTA, ...AGUSTUS 2024
KEPADA
YTH. PENJABAT WALIKOTA PANGKALPINANG
DI -
PANGKALPINANG

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA	:	
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	:	
JENIS KELAMIN	:	
NIK	:	
KUALIFIKASI PENDIDIKAN / JURUSAN	:	
JABATAN YANG DILAMAR	:	
KATEGORI FORMASI	:	UMUM*)/PENYANDANG DISABILITAS*)/ UMUM DAN KHUSUS YANG DAPAT DIISI OLEH PENYANDANG DISABILITAS *)
AGAMA	:	
ALAMAT SESUAI KTP	:	
NO. TELP. RUMAH / HP	:	

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK UNTUK DITERIMA MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI DISAMPAIKAN BERKAS LAMARAN DENGAN LAMPIRAN SEBAGAI BERIKUT :

1. SURAT LAMARAN YANG DITUJUKAN KEPADA PENJABAT WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024 DIKETIK MENGGUNAKAN KOMPUTER DAN DITEMPEL E-MATERAI RP. 10.000,- DAN DITANDATANGANI TINTA HITAM/BIRU
2. SURAT PERNYATAAN YANG DIKETIK MENGGUNAKAN KOMPUTER DITEMPEL E MATERAI RP. 10.000,- DAN DITANDATANGANI MENGGUNAKAN TINTA BIRU/HITAM;
3. KARTU TANDA PENDUDUK*)/SURAT KETERANGAN SUDAH MEREKAM DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECATATAN SIPIL*);
4. IJAZAH;
5. TRANSKRIP NILAI;
6. SURAT KETERANGAN DARI DOKTER RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS YANG MENERANGKAN JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASANNYA**).
7. VIDEO SINGKAT YANG MENUNJUKKAN KEGIATAN SEHARI-HARI PELAMAR DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS SESUAI JABATAN YANG AKAN DILAMAR.**)

DEMIKIAN PERMOHONAN INI DISAMPAIKAN, ATAS PERHATIANNYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

E-MATERAI RP 10.000,- TANDA TANGAN

(NAMA LENGKAP)

Catatan :
*) Pilih salah satu :
**) Untuk Formasi Khusus Penyandang Disabilitas danFormasi umum dan Khusus yang dapat diisi Oleh Penyandang Disabilitas

- *E Materai* ***tidak*** *tertutupi/ditimpa oleh tanda tangan*

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 810/173 /BKPSDMD/VIII/2024
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Alamat :
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., ... 2024

Yang membuat pernyataan,

E materai Rp. 10.000 + (ttd)

(Nama Lengkap)

- *E Materai **tidak** tertutupi/ditimpa oleh tanda tangan*

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG

WALI KOTA PANGKAL PINANG

BUDI UTAMA